

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI



Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.

	PERPUSTAKAAN	
NO. INV	043-h-2018	
Tn Angg	2017/2018	Cat : C1
P/...	TGL.	



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. Awal Kata	1
2. Hubungan Hukum dengan Ekonomi	4
3. Tentang Hukum Ekonomi	11
BAB 2 PEMBANGUNAN NASIONAL	21
1. Arah Pembangunan Ekonomi Nasional	21
2. Arah Pembangunan Hukum Nasional	37
3. Aliran-aliran dalam Memahami Peranan Hukum dalam Kegiatan Ekonomi	42
BAB 3 PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN	47
1. Hukum sebagai <i>a Tool of Social Engineering</i>	47
2. Hukum sebagai <i>a Tool of Social Control</i>	52
3. Hukum sebagai Alat Kontrol Pembangunan	56
4. Hukum sebagai Sarana Penegak Keadilan	61
5. Hukum sebagai Sarana Pendidikan Masyarakat	66
BAB 4 PERANAN HUKUM DALAM GLOBALISASI EKONOMI	71
1. Pendahuluan	71
2. Konfigurasi Pergaulan Globalisasi	75
3. Aspek Globalisasi dalam Perubahan Hukum	84
4. Pembinaan Hukum Nasional di Era Globalisasi	86

BAB 5 PERANAN HUKUM DALAM INVESTASI	93
1. Pendahuluan	93
2. Tujuan dan Jenis Investasi	97
a. Tujuan Investasi	97
b. Jenis Investasi	100
3. Asas-asas Hukum Investasi	105
4. Pasar Uang dan Pasar Modal	108
a. Pasar Uang	110
b. Pasar Modal	117
5. Risiko dalam Investasi	128
6. Arti Penting Investasi di Indonesia	132
a. Investasi sebagai Sumber Modal Pembangunan	132
b. Penyediaan Lapangan Pekerjaan	138
c. Sarana Alih Teknologi	140
d. Peningkatan Pendapatan Nasional	143
e. Peningkatan Pendapatan Masyarakat	146
7. Pengaturan Investasi di Indonesia	147
a. Pengaturan Investasi Secara Nasional	147
b. Pengaturan Investasi di Tingkat Daerah	149
8. Hukum Investasi Otonomi Daerah	150
a. Kebijakan Investasi Sebelum Otonomi Daerah	150
b. Kebijakan Investasi Setelah Berlaku Otonomi Daerah	154
9. Hukum Investasi Berdasarkan Syariah	159
a. Prinsip Halal	159
b. Prinsip Mashlahah	163
c. Prinsip Terhindar dari Investasi yang Terlarang	165
d. Haram karena Tadlis	169
e. Haram karena Gharar	172
f. Haram karena Maysir	173
g. Haram karena Riba	176
h. Terhindar dari Ihtikaar dan An-Najasy	178

BAB 6 HUKUM LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL	183
1. Pendahuluan	183
2. Pengaruh Lembaga Ekonomi Internasional	186
3. Keberadaan World Trade Organization (WTO)	192
a. Fungsi dan Struktur WTO	196
b. Struktur Organisasi	196
c. Status dan Personalitas Hukum WTO	197
4. International Monetary Funds (IMF)	200
5. Bank Dunia (World Bank)	206
6. Perusahaan Multinasional (MNC/TNC)	210
7. Military Industrial Complex (MIC)	218
BAB 7 PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH	223
1. Pendahuluan	223
2. Dasar Hukum Otonomi Daerah	227
a. UUD 1945	227
b. Ketetapan MPR RI	227
c. Undang-Undang	228
3. Sejarah Otonomi Daerah	231
a. Masa Orde Lama	231
b. Masa Orde Baru	234
c. Masa Reformasi	235
4. Konsep Pemerintahan di Daerah	239
a. Daerah Otonom	239
b. Daerah Otonomi Khusus	240
c. Daerah Istimewa	241
5. Politik Hukum Otonomi Daerah	243
a. Masa Orde Lama (1945-1967)	244
b. Masa Orde Baru (1967-1998)	247
c. Masa Reformasi (1998-Sekarang)	251
6. Wewenang Otonomi Daerah	261



7. Masalah-Masalah dalam Pembangunan Daerah	263
8. Segi Positif dan Negatif Otonom Daerah	264
a. Segi Positif	264
b. Segi Negatif	264
9. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah	270
10. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah	272
11. Tentang Utang Luar Negeri Daerah	273
DAFTAR PUSTAKA	277
TENTANG PENULIS	285